

## **Efektivitas Program Relawan Demokrasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum 2019 Di Kota Bitung**

**Irma Clara Juliet Lengkoan<sup>1</sup>**

**Daud Liando<sup>2</sup>**

**Neni Kumayas<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Tujuan Penelitian adalah Untuk mengetahui apakah program relawan demokrasi dapat meningkatkan partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum di kota Bitung. Dan melihat faktor apa saja yang menghambat relawan demokrasi pemilu dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat pada proses pemilihan umum. Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Fokus dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan efektivitas program relawan demokrasi dalam mendorong partisipasi masyarakat pada proses pemilu 2019 di kota Bitung, menurut Richard M. Steers dalam Tangkilisan (2005) mengungkapkan ada 3 indikator dalam efektivitas. Ia mengatakan indikator efektivitas sebagai berikut Pencapaian tujuan, integrasi dan adaptasi. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Pada aspek pencapaian tujuan sebagaimana tujuan dibentuknya relawan demokrasi yaitu dengan membantu KPU untuk mensosialisasikan tentang penyelenggaraan Pemilu namun keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan kegiatan tidak efektif, Pada aspek integrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari para anggota relawan terlihat dilaksanakan dengan melakukan Bimtek namun dengan keterbatasan waktu dan dana maka Bimtek hanya dilaksanakan secara tergesa- gesa dan waktu yang padat dan Pada aspek Adaptasi dapat dilihat bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan basis yang dimiliki oleh para anggota yang ada. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

**Kata Kunci : Efektivitas, Program, Relawan Demokrasi, Partisipasi Politik**

<sup>1</sup>Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>2</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

<sup>3</sup>Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISPOL-Unsrat

## Pendahuluan

Berdasarkan keluhan masyarakat dan Partisipasi politik masyarakat dalam penyelenggaraan pemilu merupakan salah satu sarana pembelajaran politik bagi masyarakat sehingga pemilu tidak dianggap hanya seremonial belaka yang mana partisipasi masyarakat sebatas sebagai pemilih saja. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa pemilu diselenggarakan dengan partisipasi masyarakat. Dalam hal ini menunjukkan partisipasi masyarakat menjadi salah satu indikator penting penyelenggaraan pemilu. Tanpa partisipasi atau keterlibatan pemilih, maka sesungguhnya pemilu tidak memiliki makna. Ukuran partisipasi tentu bukan sekedar kehadiran pemilih dalam memberikan suara di tempat pemungutan suara (TPS) pada hari pemungutan suara atau voter turn out, tetapi keterlibatan pemilih pada keseluruhan tahapan pemilu. Komisi Pemilihan Umum sebagai suatu lembaga penyelenggara Pemilihan Umum di Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam meningkatkan partisipasi Politik masyarakat dalam Pemilihan Umum melaksanakan kegiatan dengan berbentuk Program relawan demokrasi adalah gerakan sosial untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya di mana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Program relawan demokrasi dilatarbelakangi oleh partisipasi pemilih yang cenderung menurun. Empat pemilu nasional terakhir dan pelaksanaan pemilu kada di berbagai daerah menunjukkan indikasi itu. Pada pemilu nasional misalnya, yaitu pemilu 1999 (92%), pemilu 2004 (84%), pemilu 2009 (71%), pemilu 2014 (73%) menjadi salah satu tantangan yang dihadapi dalam upaya untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2019.

Adapun faktor yang menjadikan tingkat partisipasi mengalami tren penurunan, di antaranya adalah jenuh dengan frekuensi penyelenggaraan pemilu yang tinggi, ketidakpuasan atas kinerja sistem politik yang tidak memberikan

Adapun dasar hukum yang ada pada relawan demokrasi ini adalah Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Pada pasal 15 ayat 2 huruf f dinyatakan diadakan pembentukan agen atau relawan demokrasi.

Hubungan peraturan tersebut dengan relawan demokrasi adalah dalam peraturan tersebut membahas tentang tatakerja relawan demokrasi, masa kerja relawan demokrasi, persyaratan relawan demokrasi, kode etik relawan demokrasi, dan pembiayaan relawan demokrasi. Demi kelancaran proses pemilihan umum yang ada, relawan demokrasi mempuayi tujuan untuk meningkatkan pemilu yang berkualitas, yaitu : meningkatkan kualitas proses pemilu, meningkatkan partisipasi pemilih, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi, membangkitkan kesukarelaan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokratisasi. Melihat tujuan dari di bentuknya relawan demokrasi yang ada, bahwa relawan demokrasi ingin meningkatkan kualitas pemilu

menjadi lebih baik lagi.

Keterlibatan masyarakat dalam partisipasi pemilu merupakan bagian dari hak politik warga negara di dalam proses demokrasi. Pelibatan masyarakat diperlukan untuk meminimalisasi pelanggaran dan mengurangi ruang gerak pelaku. Di satu sisi, terjadi pelanggaran yang makin kompleks berupa praktik-praktik sosialisasi, kampanye yang menyimpang. Termasuk kampanye ilegal, kampanye hitam, pengelembungan suara, mobilisasi pemilih, politik uang, politisasi birokrasi, intimidasi, maupun manipulasi penghitungan suara, dan lain lain. Kedua, menanggapi peristiwa diatas muncul fenomena upaya dari pemerintah melalui badan formal yang bertugas sebagai pengawas pemilu seperti Bawaslu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawasi pemilu

Relawan demokrasi merupakan gerakan sosial masyarakat yang memiliki kesadaran untuk meningkatkan partisipasi pemilih dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Relawan demokrasi ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas- luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Adapun tugas dan tanggungjawab relawan demokrasi yang pertama melawan hoaks yang berkembang di tengah masyarakat, terutama hoaks yang berkembang tentang pemilu yang nantinya akan berdampak pada kualitas pemilu. Dalam hal ini juga Pemilih bisa tahu berita benar atau bohong melalui data dari relawan demokrasi, relawan demokrasi juga akan mencermati setiap gerakan di daerah yang menunggangi isu-isu sensitif itu. Yang kedua, para relawan juga diamanatkan untuk melawan politisasi isu suku, agama, ras, antargolongan (SARA). Kemudian relawan demokrasi juga melawan politik uang

dan memberikan pendidikan politik terkait hal itu kepada masyarakat dan juga pastinya relawan demokrasi harus menyadarkan pada masyarakat untuk berani menolak tawaran jika di berikan uang. Adapun peran relawan demokrasi yaitu : Meningkatkan kualitas proses pemilu di Kota Bitung, Meningkatkan partisipasi pemilih di Kota Bitung, meningkatkan kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Kota Bitung, membangkitkan sukarelawan masyarakat sipil dalam agenda pemilu dan demokrasi di Kota Bitung

Hubungan antara relawan demokrasi dan penyelenggara pemilu yaitu sama-sama mendorong partisipasi pemilih, dan memiliki tujuan yang sama untuk bisa meningkatkan kualitas pemilihan umum dan memiliki peran yang sama untuk bisa menyadarkan masyarakat akan pentingnya berdemokrasi. Dalam hal ini juga relawan demokrasi memiliki hak dan kewajiban yaitu menyadarkan masyarakat tentang pentingnya demokrasi, pemilu dan partisipasi masyarakat dalam suksesnyapemilihan umum. Dan juga melakukan sosialisasi pada masyarakat tentang tahapan pemilu seperti : tanggal, hari dan jam pemungutan suara, tata cara pemberian suara dalam pemilu, pengenalan peserta Pemilu (Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Partai Politik, DPD). Dan hal-hal lain yang dianggap sesuai dengan kebutuhan basis pemilih. Adapun aturan relawan demokrasi yang terdapat diperaturan KPU RI Nomor 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tentang Pembentukan Relawan Demokrasi Pemilu Serentak 2019. Dan di dalam nya juga menjelaskan mengenai program relawan demokrasi, maksud dan tujuan di buatnya relawan demokrasi di Kota Bitung, persyaratan relawan demokrasi, mekanisme kerja relawan demokrasi dan membahas tentang kegiatan yang bisa meningkatkan

partisipasi pemilih.

Adanya fenomena yang beragam dalam konteks partisipasi masyarakat ikut mengawasi pemilu, menjadi suatu hal yang menarik untuk diteliti dan dikaji secara mendalam. Dalam sistem politik negara demokrasi seperti Indonesia ini, mengharuskan adanya partisipasi masyarakat yang tidak hanya memberikan suaranya saja tapi juga ikut mengawasi proses tahapan dan pelaksanaan dalam konteks pemilu. Masalah kongkrit yang ada pada relawan demokrasi pada pemilihan umum Kota Bitung tahun 2019 yaitu masih banyak masyarakat yang kurang akan kesadaran dalam partisipasi pemilihan umum, karena tolak ukur dari keberhasilan pemilu yaitu tingkat partisipasi masyarakat yang tinggi sehingga dapat dikatakan pemilu yang sukses, padahal dari relawan demokrasi sendiri telah melaksanakan tugas mereka sesuai dengan peraturannya yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung. Dan juga relawan demokrasi Kota Bitung ternyata belum membangun komunikasi yang baik dengan masyarakat (public). Dan juga relawan demokrasi Kota Bitung belum maksimal dalam menyusun dan melaporkan kegiatan pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

#### **Metode Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis Penelitian ini menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dalam melakukan penelitian ini, penulis mengambil lokasi di KPU kota Bitung dan Relawan Demokrasi di Kota Bitung.

Agar dapat mengumpulkan informasi dari obyek penelitian sesuai dengan fenomena yang diamati, dilakukan pemilihan kepada unsur masyarakat secara purposive sebagai informan. Pemilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa informan memiliki pemahaman terhadap fenomena penelitian. Adapun Informan yang di pilih dalam

penelitian ini :

1. Pengurus organisasi relawan demokrasi.
2. Komisi pemilihan umum kota Bitung.

#### **Pembahasan**

##### **Objektif Responsibility Pencapaian Tujuan**

Pencapaian tujuan  
Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret.

Relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih dapat berpengaruh terhadap keputusan pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu. Sumberdaya manusia yang berkompeten sangat berperan penting terhadap kualitas kinerja relawan demokrasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan adalah salah satu komponen kompetensi yang bisa mengukur kualitas kinerja individu dalam organisasi. Kemampuan menurut Winardi (2002:16) terbagi atas tiga aspek yakni ketrampilan, pengetahuan/pendidikan, dan pengalaman kerja. Tiga aspek ini yang dapat mendorong peningkatan kompetensi sumberdaya manusia sehingga lebih berkualitas. Keterampilan dalam berbicara dan menyampaikan sesuatu sehingga lebih mudah dipahami oleh orang lain sangat berpengaruh dalam aktivitas dan pekerjaan setiap individu.

Pengetahuan yang cukup terhadap bidang pekerjaan yang ditekuni juga memberi dampak positif dan berpengaruh terhadap kualitas kinerja individu. Aspek pengalaman kerja juga memegang peranan penting dalam membentuk penguasaan kompetensi seseorang dalam tugas. Seseorang yang mempunyai pengalaman kerja akan lebih berkualitas kinerjanya dibandingkan dengan seseorang yang belum berpengalaman sama sekali.

Sumber daya manusia yang trampil, berpendidikan dan mempunyai pengalaman kerja sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan organisasi. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang trampil, berpengetahuan, dan mempunyai pengalaman yang cukup dapat dihasilkan melalui pemberian materi dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis yang sering dilakukan. Meskipun dari aspek rekrutmen sumber daya manusia sudah sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan, namun jika tidak diikuti dengan pelatihan atau bimbingan teknis yang cukup untuk meningkatkan keterampilan atau pendidikan dan pengetahuan dari aspek yang diperlukan dalam pekerjaan, maka kualitas sumber daya manusianya masih akan rendah. Terlebih jika individu yang bersangkutan tidak mau untuk belajar atau memotivasi diri sendiri, maka tidak akan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusianya dan pada akhirnya kualitas kinerjanya tidak akan baik.

Pada pelatihan atau bimbingan teknis untuk pembekalan bagi relawan demokrasi yang dilaksanakan oleh KPU Kota Bitung hanya dilakukan sekali saja, setelah itu ada 2 kali pertemuan yang berbentuk rapat dan bukan pemberian materi. Kurangnya pemberian materi dalam bentuk bimbingan teknis membuat relawan

demokrasi cukup kesulitan ketika memberikan pendidikan kepada pemilih, terlebih lagi modul yang diharapkan dapat menjadi guidance atau panduan bagi relawan demokrasi diberikan ketika kegiatan edukasi ke pemilih sudah berlangsung.

Tujuan dari pendidikan atau edukasi ke pemilih adalah meningkatkan kerelawanan pemilih untuk ikut serta dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealism tertentu dengan tanpa pamrih. Dengan meningkatnya kerelawanan, maka pragmatisme dapat dicegah. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Oleh karena itu, pendidikan pemilih menjadi sangat penting dan harus diseriusi oleh penyelenggara dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum, karena keputusan pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu juga dapat bergantung pada bagaimana relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih. Untuk itu, diperlukan sumber daya manusia dalam keanggotaan relawan demokrasi yang trampil, mempunyai pengetahuan yang cukup serta mempunyai pengalaman kerja khususnya dalam hal kepemiluan.

Anggota relawan demokrasi cukup kesulitan dalam memberikan pendidikan ke pemilih. Ini disebabkan kurangnya ketrampilan dan pengetahuan yang cukup tentang kepemiluan. Ketrampilan dan pengetahuan yang kurang disebabkan kurangnya bimbingan teknis yang diberikan selama program relawan demokrasi berlangsung. pelaksanaan bimbingan teknis hanya diberikan satu kali selama program berlangsung, yaitu saat pengukuhan anggota relawan demokrasi. dan partisipasi masyarakat yang mengatakan bahwa pemberian

bimbingan teknis hanya sekali dilakukan. pemberian modul materi pemilihan yang mereka harapkan dapat menjadi pedoman atau guidance dalam membantu mereka ketika memberikan edukasi pemilihan kepada pemilih terlambat diberikan oleh KPU Kota Bitung.

Modul materi kepada relawan kota Bitung Bitung tentang pemilihan tersebut diberikan ketika kegiatan pendidikan ke pemilih sudah masuk bulan Februari sementara program edukasi ke pemilih dimulai pada tanggal 23 Januari tahun 2019.

Aspek pengalaman yang dimiliki oleh para relawan dinilai juga menjadi hal yang penting dalam pencapaian kualitas kinerja individu relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih yang pada akhirnya akan membantu pencapaian kualitas kinerja program relawan demokrasi itu sendiri. Dari jumlah 55 anggota relawan demokrasi pada pemilihan legislatif di Kota Bitung tahun 2019, hanya 4 orang anggota relawan demokrasi yang sudah 2 kali menjadi anggota relawan sementara sisanya baru sekali menjabat. Kemudian dari segi latar belakang, hanya 1 orang anggota relawan yang pernah menjabat sebagai penyelenggara sementara sisanya belum pernah menjadi penyelenggara. Berdasarkan hal di atas, dapat terlihat bahwa hampir semua anggota relawan demokrasi adalah mereka yang baru menjabat dan belum pernah menjadi penyelenggara, sehingga belum memiliki pengalaman yang cukup dalam pencapaian kualitas kinerja individu dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih melihat hal ini menjadi kekurangan yang ada sehingga mengurangi keefektifan dalam pelaksanaan program relawan demokrasi kota Bitung.

### **Integrasi**

Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkat kemampuan suatu organisasi untuk mengadakan sosialisasi

atau komunikasi dan pengembangan konsensus. Integrasi menyangkut proses sosialisasi. Dalam penelitian ini, jumlah pekerjaan adalah jumlah kegiatan yang dilakukan dalam memberikan edukasi atau pendidikan kepada pemilih.

Relawan demokrasi dibentuk oleh KPU tanggal 09 Januari 2019 berdasarkan Petunjuk Teknis (JUKNIS) pelaksanaan program relawan demokrasi pemilu 2019 No. 32/PP.08-SD/06/KPU/I/2019 tanggal 09 Januari 2019. Relawan Demokrasi adalah gerakan sosial yang dimaksudkan untuk meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam menggunakan hak pilih. Program ini melibatkan peran serta masyarakat yang seluas-luasnya dimana mereka ditempatkan sebagai pelopor (pioneer) demokrasi bagi komunitasnya. Relawan demokrasi menjadi mitra KPU dalam menjalankan agenda sosialisasi dan pendidikan pemilih berbasis kabupaten/kota. Bentuk peran serta masyarakat ini diharapkan mampu mendorong tumbuhnya kesadaran tinggi serta tanggung jawab penuh masyarakat untuk menggunakan haknya dalam pemilu secara optimal.

Berdasarkan hasil penelitian jika dilihat dari aspek ini, menunjukkan bahwa jumlah kegiatan yang dilakukan oleh relawan demokrasi di masing-masing basis yang sebanyak 6 kegiatan belum dapat mencakup seluruh wilayah kecamatan di Kota Bitung. Dari sebanyak 8 kecamatan yang ada di Kota Bitung jika dimisalkan setiap relawan demokrasi di masing-masing basis melaksanakan 6 kegiatan per 1 kecamatan, maka hanya ada 6 kecamatan yang mendapatkan edukasi atau pendidikan ke pemilih sementara sisa kecamatan tidak mendapatkan edukasi pemilihan tersebut.

Tujuan dari pendidikan atau edukasi ke pemilih adalah meningkatkan kerelawanan pemilih untuk ikut serta dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealisme tertentu dengan tanpa pamrih. Dengan meningkatnya kerelawanan, maka pragmatisme dapat dicegah. Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak

berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Untuk mencapai tujuan edukasi tersebut, diperlukan kegiatan relawan.

### 1. Adaptasi

Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Relawan demokrasi Bitung melakukan kegiatan dengan melihat basis anggota. Dengan adanya basis ini maka relawan demokrasi dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan lingkungannya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik yang dapat dilihat seperti di bawah ini :

### 2. Basis Keluarga

Basis keluarga sebagai salah satu orientasi gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena keluarga merupakan unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi. Keluarga merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Bahkan adapula ahli yang menyebutkan keluarga adalah abstraksi dari sebuah ideologi yang memiliki citra romantis, suatu proses, sebagai satuan perlakuan intervensi, sebagai suatu jaringan dan tujuan atau peristirahatan akhir.

Pada akhirnya semua basis pemilih yang ada di tengah-tengah masyarakat akan kembali kepada keluarganya masing-masing. Kebutuhan mereka baik secara fisik maupun psikologis anggotanya dipenuhi melalui struktur keluarga, termasuk kebutuhan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Tidak ada seorang manusiapun di dunia ini yang dapat melepaskan diri dari lingkungan keluarga. Ketika seseorang itu melepaskan diri dari unit keluarganya, maka sesungguhnya orang tersebut telah melepaskan diri dari struktur sosial masyarakat atau menjadi asosial. Bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke ibu-

ibu arisan, perkumpulan rutin tingkat RT/RW atau lingkungan dan lorong di Bitung, .

### 3. Basis Pemilih Pemula

Gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih diorientasikan kepada pemilih pemula atau first time voters. Sejumlah riset menunjukkan pemilih pemula yang menggunakan hak pilihnya ketika pertama kali memasuki usia memilih, mempunyai kecenderungan untuk memilih pada pemilu berikutnya. Sebaliknya mereka yang tidak menggunakan hak pilih ketika pertama kali memasuki usia memilih, kecenderungannya akan melakukan hal yang serupa pada pemilu berikutnya.

Pemilih pemula adalah mereka yang akan memasuki usia memilih dan akan menggunakan hak pilihnya untuk pertama kali dalam pemilu. Dengan siklus pemilu di Indonesia yang digelar setiap lima tahun sekali, maka kisaran usia pemilih pemula adalah 17-21 tahun. Pemilih pemula umumnya masih duduk di sekolah menengah atas (SMA) atau sederajat dan mereka yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Di luar itu, anak-anak putus sekolah yang berusia 17-21 tahun juga merupakan basis pemilih pemula yang membutuhkan sosialisasi dan pendidikan pemilih.

Pemilih pemula yang berstatus mahasiswa merupakan elemen penting dalam struktur dan dinamika politik dan demokrasi. Mereka memiliki potensi besar sebagai penggerak perubahan karena mempunyai horizon atau cakrawala yang luas di antara masyarakat. Mahasiswa sebagai kelompok yang akan memasuki lapisan atas dari susunan kekuasaan, struktur perekonomian dan prestise dalam masyarakat dengan sendirinya merupakan elit di dalam kalangan angkatan muda. bentuk kegiatannya adalah sosialisasi

dan pendidikan pemilih ke sekolah-sekolah (SMA/SMK/MA/Sederajat)

#### 4. Basis Pemilih Muda

Basis pemilih muda dijadikan sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih karena jumlah mereka dalam struktur pemilih yang cukup signifikan. Mereka yang disebut pemuda sesuai Undang Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan adalah warga Negara yang berusia 16 tahun sampai 30 tahun. Dalam konteks pemilu, mereka yang disebut basis pemilih muda adalah warga Negara yang telah memiliki hak pilih dan usianya tidak melebihi 30 tahun. Dengan demikian, kisaran usia pemilih muda adalah 22 tahun sampai 30 tahun.

Pemilih muda baik yang berstatus mahasiswa, pekerja maupun belum/tidak bekerja penting mendapat sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka akan mengisi struktur pemilih dalam jangka waktu yang sangat lama. Edukasi secara terus menerus dibutuhkan agar kepercayaan mereka terhadap pemilu sebagai instrumen demokrasi makin kuat dan mendalam. Kebiasaan mereka memilih harus dipupuk dan disemai agar tidak tergerus oleh apatisisme maupun pragmatisme politik yang pada akhirnya akan merusak kualitas demokrasi.

bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke organisasi kepemudaan, seperti Karang taruna dan persatuan mahasiswa Unsrat di Bitung, persatuan Mahasiswa Unima di Bitung.

#### 5. Basis Pemilih Perempuan

Basis pemilih perempuan menjadi sasaran sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak hanya akan memainkan peran strategis dalam mengasuh dan mendidik anak ketika mereka menjadi ibu rumah tangga. Tetapi juga dapat memainkan peran untuk memotivasi dan mengedukasi lingkungan, setidaknya pada komunitasnya. Perempuan yang berstatus ibu memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk pengetahuan, sikap dan tingkah laku anak. Pengaruh kehidupan keluarga yang didominasi oleh peran ibu baik langsung

maupun tidak langsung merupakan struktur sosialisasi politik pertama yang dialami seseorang sangat kuat dan kekal.

Pengalaman berpartisipasi dalam pembuatan keputusan keluarga dapat meningkatkan perasaan kompetensi politik si anak, memberinya kecakapan-kecakapan untuk melakukan interaksi politik, serta membuatnya lebih mungkin berpartisipasi dengan aktif dalam sistem politik sesudah menjadi dewasa. Keluarga juga membentuk sikap-sikap politik masa depan dengan menempatkan individu dalam dunia kemasyarakatan yang lebih luas.

Selain perempuan sebagai sosok sentral dalam mendidik anak, alasan lain menjadikan perempuan sebagai basis sosialisasi dan pendidikan pemilih adalah:

- 1) Jumlah pemilih perempuan berimbang dengan jumlah pemilih laki-laki, namun kapasitasnya masih terbatas dibanding laki-laki;
- 2) Pemilih perempuan rentan dimobilisasi ketika pemilu maupun di luar pemilu;
- 3) Tingkat pendidikan perempuan rata-rata lebih rendah dari laki-laki
- 4) Pemilih perempuan lebih banyak memainkan peran-peran domestik sehingga urusan publik terabaikan, padahal banyak menyangkut kepentingan perempuan.

bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke kelompok-kelompok perempuan, ibu-ibu/emak-emak kompleks,

#### 6. Basis Pemilih Penyandang Disabilitas

Berdasarkan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang dimaksud dengan penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Penyandang disabilitas menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena terdapat kecenderungan mereka tidak akan menggunakan hak pilih jika tidak ada kepastian bahwa penyelenggaraan pemilu benar-benar aksesibel terhadap keterbatasan yang mereka miliki. Untuk itu, penyelenggara pemilu harus menyosialisasikan tentang kebijakan dan bentuk layanan ramah disabilitas untuk semua jenis disabilitas. Hal ini diperlukan mengingat banyaknya ragam pemilih disabilitas dan perbedaan kebutuhan layanan dari setiap jenis disabilitas. bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas/masyarakat penyandang disabilitas di rumah tuna rungu madidir .

### **7. Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus**

Pemilih berkebutuhan khusus yakni pemilih yang mencakup masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga permasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan, dan kelompok lain yang terpinggirkan.

Pemilih berkebutuhan khusus menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih dikarenakan minimnya informasi yang mereka peroleh, utamanya yang berkaitan dengan kepemiluan. Hal ini disebabkan karena mereka tinggal di wilayah yang mempunyai kekhususan dari aspek aksesibilitas wilayah yang sulit dijangkau, eksklusif karena tidak semua orang bisa bebas masuk ke area mereka seperti Lembaga Pemasyarakatan, Rumah Sakit dan sebagainya.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM, jumlah narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mencapai 242.903 orang hingga Mei 2018. Tentunya ini bukan angka yang kecil, sebagian besar dari mereka adalah pemilih yang berhak untuk mendapatkan sosialisasi dan pendidikan pemilih dari KPU.

bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke narapidana penghuni Lembaga Pemasyarakatan, pegawai perkebunan

sawit, masyarakat adat, di pulau Lembeh

### **8. Basis Pemilih Marginal**

Kelompok marginal menjadi basis sosialisasi dan pendidikan pemilih karena mereka tidak memiliki sumber daya, akses informasi, dan kepercayaan diri yang cukup. Mereka memiliki hak hidup dan hak berpartisipasi yang sama dengan warga Negara lainnya. Tetapi situasi dan kondisi kehidupan membuat mereka dalam posisi yang tidak berdaya dan tidak memiliki motivasi berpartisipasi dalam kehidupan sosial dan politik. Mereka membutuhkan sosialisasi, motivasi dan fasilitasi untuk dapat berpartisipasi sehingga secara sosial mereka tidak makin terbelakang.

bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke masyarakat nelayan pinggir, komunitas waria, LGBT, masyarakat miskin kota, pemulung.

### **9. Basis Komunitas**

Komunitas adalah sekelompok orang yang saling peduli satu sama lain lebih dari yang seharusnya. Dalam sebuah komunitas terjadi relasi pribadi yang erat antar anggota komunitas tersebut karena adanya kesamaan nilai dan kepentingan. Dalam komunitas, manusia-manusia individu di dalamnya memiliki maksud, kepercayaan, sumber daya, preferensi, kebutuhan, risiko dan sejumlah kondisi lain yang serupa.

Komunitas dapat dibagi 2 (dua) komponen. Pertama, berdasarkan lokasi, di mana sebuah komunitas dapat dilihat sebagai tempat sekumpulan orang mempunyai sesuatu yang sama secara geografis. Kedua, berdasarkan minat sekelompok orang yang mendirikan suatu komunitas karena ketertarikan dan minat yang sama seperti komunitas hobi yang saat ini sedang menjadi tren di masyarakat kita seperti komunitas sepeda santai, komunitas fotografi, komunitas skateboard dan lain sebagainya.

Komunitas secara umum jauh dari aktivitas politik, tetapi mereka bukan berarti mereka miskin informasi politik. Tak jarang pula para anggota komunitas membahas isu-isu politik terkini di tengah

mereka menjalankan aktivitas di komunitasnya. Komunitas juga memiliki tingkat kemandirian yang tinggi karena pada umumnya mereka sudah mapan dari aspek pendidikan, finansial dan pemikiran. Jika kita dapat merangkul dan memberi pemahaman kepada satu atau dua orang yang memiliki pengaruh di suatu komunitas maka anggota lainnya akan lebih mudah diajak untuk mengikuti sosialisasi dan pendidikan pemilih.

bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke komunitas pecinta kuliner, di sekitar tenda Biru komunitas keolahragaan, komunitas hobi, komunitas masyarakat etnis Jawa, etnis Batak yang telah tinggal dan berdomisili di Kota Bitung.

#### **10. Basis Keagamaan**

Sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan selama ini diorientasikan kepada tokoh-tokoh agama saja. Akibatnya jamaah berbagai agama di Indonesia yang jumlahnya sangat besar dan tak sebanding dengan jumlah tokohnya tidak tersentuh. Sosialisasi dan pendidikan pemilih tidak mengakar kuat. Informasi pemilu dan demokrasi beredar di tataran elit keagamaan saja.

Orientasi sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada basis keagamaan ke depan harus diubah dari gerakan yang elitis menjadi gerakan populer. Distribusi dan konsumsi informasi ke pemilu dan demokrasi harus masuk ke dalam ruang kehidupan para jamaah. Penyelenggara pemilu harus dapat bersinergi dan berkolaborasi dengan kelompok keagamaan agar dapat menggunakan forum- forum keagamaan seperti pengajian sebagai sarana sosialisasi dan pendidikan pemilih bentuk kegiatannya adalah sosialisasi dan pendidikan pemilih ke jamaah sholat jumat, jamaah gereja kolom-kolom /pura/wihara/klenteng

#### **11. Basis Relasi**

Basis Relasi ini dilakukan kegiatan sosialisasi pendidikan pemilih berdasarkan hubungan pertemanan, dimana kegiatan yang dilakukan dengan aktivitas kegiatan

yang saling mengenal antara satu dengan yang lain yang telah membantuk satu kelompok pertemanan seperti persatuan pemuda lorong Madidir dan persatuan generasi muda perumahan Maesaan yang tentunya dapat memikat berbagai hubungan yang sinergitas dalam membangun pemilu yang damai dan berdedikasi

#### **12. Basis Warga Internet (Netizen)**

Peningkatan akses informasi menggunakan internet terus bertambah setiap tahun. Berdasarkan hasil survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Tahun 2016, pengguna internet Indonesia saat ini mencapai 132,7 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 70 persen dari pengguna internet Indonesia paling sering mengakses internet dari perangkat bergerak atau mobile gadget. Aktivitas komunikasi dan akses informasi menggunakan internet tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Melalui smartphone, manusia milenial dapat berkomunikasi dan mengakses informasi kapanpun dan di manapun sepanjang tersedia jaringan komunikasi.

Intensitas komunikasi dan persebaran informasi yang begitu tinggi di dunia maya menjadi alasan bagi penyelenggara pemilu untuk menasar basis warga internet sebagai basis gerakan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Penyelenggara pemilu di semua satuan kerja (satker) mesti membentuk dan menghidupkan media komunikasi berbasis internet seperti website dan media sosial seperti twiter, facebook, instagram dan platform media sosial lainnya. Diskursus politik, demokrasi dan pemilu di dunia maya harus mampu kita imbangi melalui status, kicauan dan komentar-komentar yang segar, elegan, cerdas dan mendidik pemilih perempuan, basis penyandang disabilitas, basis pemilih berkebutuhan khusus, basis kaum

marginal, basis komunitas, basis keagamaan, dan basis walingkungannya internet. Pelopor-pelopor demokrasi dibentuk di setiap basis, yang kemudian menjadi penyuluh pada masing-masing komunitasnya. Segmentasi berdasarkan basis pemilih dilakukan dengan kesadaran bahwa tidak semua lapisan masyarakat mampu dijangkau oleh program KPU

## **Penutup Kesimpulan**

Pada aspek pencapaian tujuan sebagaimana tujuan dibentuknya relawan demokrasi yaitu dengan membantu KPU untuk mensosialisasikan tentang penyelenggaraan Pemilu namun keterbatasan pengetahuan dan sumber daya manusia sehingga pelaksanaan kegiatan tidak efektif. Pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari 2 sub-indikator, yaitu : kurun waktu dan sasaran yang merupakan target kongkret. Relawan demokrasi dalam memberikan edukasi atau pendidikan ke pemilih dapat berpengaruh terhadap keputusan pemilih dalam menggunakan hak konstitusionalnya dalam penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu

Pada aspek integrasi dalam rangka meningkatkan kapasitas dari para anggota relawan terlihat dilaksanakan dengan melakukan Bimtek namun dengan keterbatasan waktu dan dana maka Bimtek hanya dilaksanakan secara tergesa-gesa dan waktu yang padat. Tujuan dari pendidikan atau edukasi ke pemilih adalah meningkatkan kerelawanan pemilih untuk ikut serta dalam proses politik yang didorong oleh suatu idealism tertentu dengan tanpa pamrih. Dengan meningkatnya kerelawanan, maka pragmatisme dapat dicegah.

Pragmatisme merujuk pada perilaku untuk berpartisipasi atau tidak berpartisipasi dalam proses politik karena adanya insentif material. Untuk mencapai tujuan edukasi tersebut, diperlukan kegiatan relawan.

Pada aspek Adaptasi dapat dilihat bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan disesuaikan dengan basis yang dimiliki oleh para anggota yang ada. Adaptasi adalah kemampuan organisasi untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Berkaitan dengan kesesuaian pelaksanaan program dengan keadaan di lapangan. Relawan demokrasi Bitung melakukan kegiatan dengan melihat basis anggota Dengan adanya basis ini maka relawan demokrasi dapat menyesuaikan diri dengan keberadaan lingkungannya agar dapat melaksanakan tugas dengan baik yang dapat dilihat

## **Saran**

Pada aspek pencapaian tujuan dengan keterbatasan sumber daya manusia maka diperlukan untuk meningkatkan kapasitas SDM relawan demokrasi dengan berbagai pelatihan sampai juga mengevaluasi hasil kegiatan pelatihan tersebut. Maka dari itu pentingnya aspek pencapaian tujuan ini bisa membentuk keterbatasan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas dari setiap relawan demokrasi dengan berbagai pelatihan sampai pada evaluasi dari hasil kegiatan pelatihan yang telah dilakukan.

Pada aspek integrasi dalam meningkatkan integrasi dari setiap anggota relawan maka metode Bimtek seharusnya ada pengukuran sehingga dapat diketahui tentang tingkat kemampuan dan serapan dari para anggota relawan yang akan melaksanakan tugas

## **Daftar Pustaka**

- Agung kurniawan 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaharuan.
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka. Jakarta.

- Hidayat, 1986. *Defini efektivitas*, Bandung: Angkasa.
- Isjwara, 1995. *Pengantar ilmu politik*. Bandung : Putra a bardin.
- Liando, Ferry Daud, dkk. 2019. *Tata Kelola Pemilu di Indonesia*. Penerbit KPURI.
- J. Moleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya;Bandung.
- Kartono, Kartini, (1996), *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: CV.Mandar.
- Steers, M. Richard. 1985. *Efektivitas Organisasi*. Jakarta: Erlangga.
- Sastroatmodjo, Sudijono. 1995. *Perilaku Politik*. IKIP Semarang Press. Semarang
- S p siagian,1978. *Manajemen*, Yogyakarta: Libert.
- Soekanto, Soerjono. (1982). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: CV Rajawali
- .